

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab Kajian Pustaka peneliti akan menguraikan dan membahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi bagi peneliti dalam memahami rumusan masalah yang akan diteliti, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari penelaahan sebelumnya yang akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang akan dihadapi.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian penting dari suatu penelitian, sebagai dasar pemahaman sebelum peneliti mulai melakukan suatu penelitian. Sugiyono (2018:54) mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain.

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Siregar dan Hasanah, 2021). Pimpinan pemerintahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pimpinan unit kerja terkecil saja melainkan setiap individu. Kehadiran sistem kontrol tidak hanya merupakan upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya mengubah sikap dan perilaku pemerintah desa. Peraturan yang dikeluarkan adalah awal dari perbaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan SPIP sangat bergantung pada komitmen, keteladanan

kepala desa, dan itikad baik seluruh aparatur internal pemerintah desa (Ulfa dan Surya, 2024).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern



Gambar 2.1 lima unsur sistem pengendalian internal

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian internal dapat dilihat pada gambar di atas ini. Gambar tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika (sub unsur 1.1) organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya

dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Selain itu, kompetensi (sub unsur 1.2) yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing.

Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif (sub unsur 1.3) sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan (sub unsur 1.4) dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat (sub unsur 1.5). Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia (sub unsur 1.6) yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (sub unsur 1.7) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik (sub unsur 1.8) diantara instansi pemerintah yang terkait.

Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin

selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko (sub unsur 2.1) atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko (sub unsur 2.2) yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat (sub unsur 3.1 sampai dengan 3.11). Dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan (sub unsure 4.1 dan 4.2) serta dilakukan pemantauan (sub unsur 5.1 dan 5.2) secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Gambar di atas juga memberikan pemahaman, bahwa kelima unsur SPIP tersebut dapat berlaku baik pada tingkat instansi secara keseluruhan maupun pada fungsi/aktivitas tertentu saja.

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2). Untuk memahami definisi diatas sebaiknya dipahami beberapa variabel definisi sebagaimana diuraikan dibawah ini, yaitu :

Kriteria penyelenggaraan SPIP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan demikian, untuk membangun SPIP sebaiknya difahami berbagai tingkatan manajemen dan prioritas pengendaliannya. Dengan penerapan SPIP pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan menghasilkan proses pembangunan SPIP yang ekonomis, efisien dan efektif. SPIP bukan sekedar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan perundang-undangan, SPIP harus diterapkan sebagai budaya pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Kriteria tujuan penyelenggaraan penerapan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Variabel ini menyatakan bahwa penyelenggaraan penerapan SPIP ditunjukkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam definisi pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 keyakinan memadai tersebut ditunjukkan melalui :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Kendalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kriteria aktor penerapan yaitu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dan diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Variabel ini menyatakan bahwa SPIP dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan demikian mandat pelaksanaan SPIP ini lebih dibebankan pada orang dan/atau jabatan

2.1.2 Maksud dan Tujuan SPIP

SPIP sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Unsur SPIP

Unsur SPIP seperti yang di sampaikan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 3 yaitu terdiri dari :

2.1.3.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud diciptakan oleh pimpinan instansi pemerintah yang merupakan dasar fondasi SPIP melalui :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika, yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan yang merupakan cerminan dari nilai etika dasar.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi, agar tidak tergantung satu orang.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2.1.3.2 Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan pada instansi pemerintah hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena risiko merupakan sesuatu yang ada unsur ketidakpastian dan tidak pasti kapan akan terjadi

2.1.3.3 Kegiatan pengendalian

Penerapan kegiatan pengendalian menurut pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 tahun 2008 sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.

- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

2.1.3.4 Informasi dan Komunikasi

Unsur komunikasi dan informasi merupakan pencerminan interaksi antar strata pemerintahan dan/atau antara pimpinan, pegawai, dan metode kerja dalam mencapai tujuan dan/atau kinerja yang ditetapkan. Komunikasi dan informasi wajib diselenggarakan dengan efektif dan untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Terdiri dari: sarana komunikasi dan sistem informasi.

2.1.3.5 Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan adalah pencerminan penerapan kegiatan pengendalian dan komunikasi pengendalian yang terus menerus dilakukan pada suatu instansi pemerintah. Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2018 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk itu dapat dirumuskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu pegawai yang dapat dilihat dari beberapa aspek yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dalam mencapai suatu tujuan baik perusahaan maupun instansi dalam pemerintahan. Jika seseorang memiliki kompetensi akan bekerja dengan keterampilannya dan pengetahuan yang dimiliki untuk bekerja secara cepat, mudah, intuitif dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk meminimalkan kesalahan.

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam sebuah organisasi, untuk itu perlunya pengelolaan sumber daya yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa faktor yang diperlukan dalam penempatan sumber daya manusia yaitu :

- 1) Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang prestasi akademis pendidikan menjadi acuan pemberian beban kerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan.

- 2) Pengalam Kerja

Pengalaman kerja yang dimiliki seseorang cenderung menjadi kelebihan tersendiri bagi pekerja, pengalaman kerja seseorang membantunya dalam mengerjakan tugas yang telah diemban.

- 3) Kesehatan fisik dan mental

Sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau inividu suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya

secara efektif dan efisien, yang mana kapasitas harus dilihat dari kemampuan dalam mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) (Liza Rahayu, 2014).

Pada umumnya Kompetensi dibagi menjadi dua kelompok yaitu *soft compatanance (generic competence)* dan kompetensi perbidang yaitu kemampuan seseorang terhadap pekerjaan tertentu. Untuk itu dalam menciptakan karyawan yang memiliki kinerja baik dan berkualitas perlu adanya manajemen sumber daya manusia.

Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan hal-hal yang mencakup tentang pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri (Bartos Basar, 2012). Kadarisman M, (2013) mengemukakan bahwa berdasarkan masa pelaksanaannya manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- 1) PreService Training (Pelatihan Pra Tugas) Pemberian pelatihan kepada calon karyawan baru untuk memulai bekerja yang bersifat pembekalan, untuk mengetahui tugas yang akan dibebankan kepada karyawan.
- 2) In Service Training (Pelatihan dalam Tugas) Diberikan kepada karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan.
- 3) Post Service Training (Pelatihan Purna/Pasca Tugas) Pelatihan ini diberikan pada karyawan yang akan menghadapi masa pensiunnya.

2.1.5 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan orang-orang yang berkompeten (Zulkifli, 2018).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2015: 105)

2.1.5.1. Komponen Laporan Keuangan

Didalam PSAK No. 1 Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari :

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;
- 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- 6) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya

Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporannya.

2.1.5.2 Penggunaan Laporan Keuangan

Adapun pengguna laporan keuangan adalah sebaga berikut :

- 1) Stakeholder
Stakeholder memerlukan laporan keuangan untuk membantu menentukan keputusan apakah investor tersebut menahan, menjual, atau membeli.
- 2) Karyawan
Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
- 3) Pemberian jaminan (Kreditor)
Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah pemberi jaminan akan memberikan pinjaman.
- 4) Pemasok dan kreditur lain
Laporan keuangan memberikan informasi kemampuan entitas membayar liabilitas/kewajiban pada saat jatuh tempo.
- 5) Pelanggan
Laporan keuangan memberikan informasi kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.

6) Pemerintah

Laporan keuangan ada untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya.

7) Masyarakat

Laporan keuangan sebagai informasi untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas.

2.1.6 Laporan Keuangan Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas tertentu. Dimana tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi LRA berguna dalam mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas terhadap anggaran. Dari LRA dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah satu indikator produktivitas atau kinerja entitas. Penyajian LRA menggunakan basis kas.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan LO untuk memperoleh informasi :

- Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan
- Operasi keuangan menyeluruh yang berguna mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
- Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara komparatif; dan
- Penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama satu periode tertentu.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi mikro

- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan keuangan secara umum mempunyai peranan prospektif dan prediktif yang menyediakan informasi laporan keuangan yang berguna untuk memprediksi sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait (Hardiansyah, 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

1) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi dikatakan relevan yaitu :

- Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (prediktive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Adapun keterbatasan yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi yang relevan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu :

- Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

- Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya, untuk itu laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.

- Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Hal ini diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dapat dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

2) Handal

Informasi yang ada dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang handal memenuhi karakteristik berikut:

- Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak dapat berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terkait peran sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Diantaranya Indrawati, et al (2020), penelitiannya bertujuan untuk mengkaji peran sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, kedua untuk memeriksa peran pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, ketiga untuk menguji peran kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dan pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Data yang dipergunakan ialah data primer yang bersumber dari

penyebaran kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 OPD berupa Dinas dan Badan di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi, sampel dalam penelitian ini diambil dari setiap OPD 5 responden yaitu Kasubag Keuangan, Bendahara, dan tiga orang Staf Akuntansi. Dari syarat tersebut didapat sampel 125 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung kepada dinas-dinas terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis dengan bantuan SPSS vers 21. Sebelum analisis regresi dilakukan, uji kualitas data dan uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan apakah model regresi sudah memenuhi asumsi valid, reliabel, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Hasil pengujian atas hipotesis menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen organisasi hanya berhasil memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Siregar dan Hasanah (2021) dalam penelitiannya menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan OPD di kabupaten Labuhanbatu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel independennya adalah standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola keuangan/kasubbag, bendahara dan staf pembantu penyusun laporan keuangan di seluruh OPD Labuhanbatu. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner di seluruh OPD Labuhanbatu. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan bukti

bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi.

Admajaya dan Wahyundaru (2020) dalam penelitiannya bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penerapan akuntansi pemerintahan standar kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang. Manfaat penelitian adalah untuk menjadi sumber informasi dan wawasan serta rujukan bagi SKPD dalam pengembangan manusia sumber daya, teknologi informasi, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap akuntansi pemerintah standar berupa transparansi dan akuntabilitas dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sumber dalam mengembangkan pengetahuan umum tentang kompetensi. sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintahan di SKPD. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif interpretatif data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kerja Kabupaten Semarang Satuan. Metode pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling. Sampel yang diambil dari SKPD sebanyak 68 orang Kabupaten Semarang. Metode statistik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS perangkat lunak. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Menggunakan Uji Validitas dan Uji Keandalan. Uji hipotesis Uji t, Uji F, Uji R², Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Informasi Teknologi, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang.

Yusuf dan Munggaran (2020), penelitiannya bertujuan untuk meneliti pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah

dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan, dengan obyek penelitian pada Kementerian Sosial. Populasi pada penelitian ini sebanyak 93 orang yang merupakan pejabat struktural serta fungsional keuangan serta auditor internal pada satuan kerja pusat Kementerian X dan sample penelitian ini melibatkan 48 responden dengan metode purposive sampling dalam pemilihan sampelnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan menggunakan bantuan SPSS ver. 21. Hasil pengujian seluruh hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan variabel independen standar akuntansi pemerintahan (X1), sistem pengendalian intern pemerintahan (X2), dan auditor internal pemerintah (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sedangkan secara parsial variabel standar akuntansi pemerintahan (X1) memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sistem pengendalian intern pemerintahan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dan auditor internal pemerintah (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Lestari dan Dewi (2020) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS 20 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan

Pebriani (2019) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran Audit Internal secara parsial maupun bersama-sama terhadap kualitas

LKPD dan pengaruhnya yang dimoderasi oleh SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan survey eksplanatori dengan ukuran sampel 108 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda dengan pengujian variabel moderasi menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis) dan pengolahan data menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran Audit Internal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas LKPD, namun secara parsial penerapan SAP tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian secara moderasi variabel peran audit internal yang dimoderasi oleh SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Kesimpulan penelitian ini berhasil menemukan bahwa untuk meningkatkan kualitas LKPD studi kasus pada OPD di Kabupaten Banyuasin, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan terhadap SPIP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD, pemerintah perlu meningkatkan kualitas audit internal guna meningkatkan peran pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan revidi laporan keuangan sehingga mampu bekerja secara profesional, obyektif dan independen.

Ira Gustina (2021), dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi penelitian ini Kasubbag Keuangan dan Bendahara Keuangan dan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 kuesioner. Metode Analisis data digunakan adalah regresi linier berganda, pengujian uji asumsi klasik digunakan uji normalitas data, multikolinieritas dan heterokedastisitas. Pengujian statistic descriptive, hipotesa uji -t dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai Adjusted R Square 0,349 artinya bahwa terdapat 34,9% pengaruh variabel Kualitas Laporan Keuangan

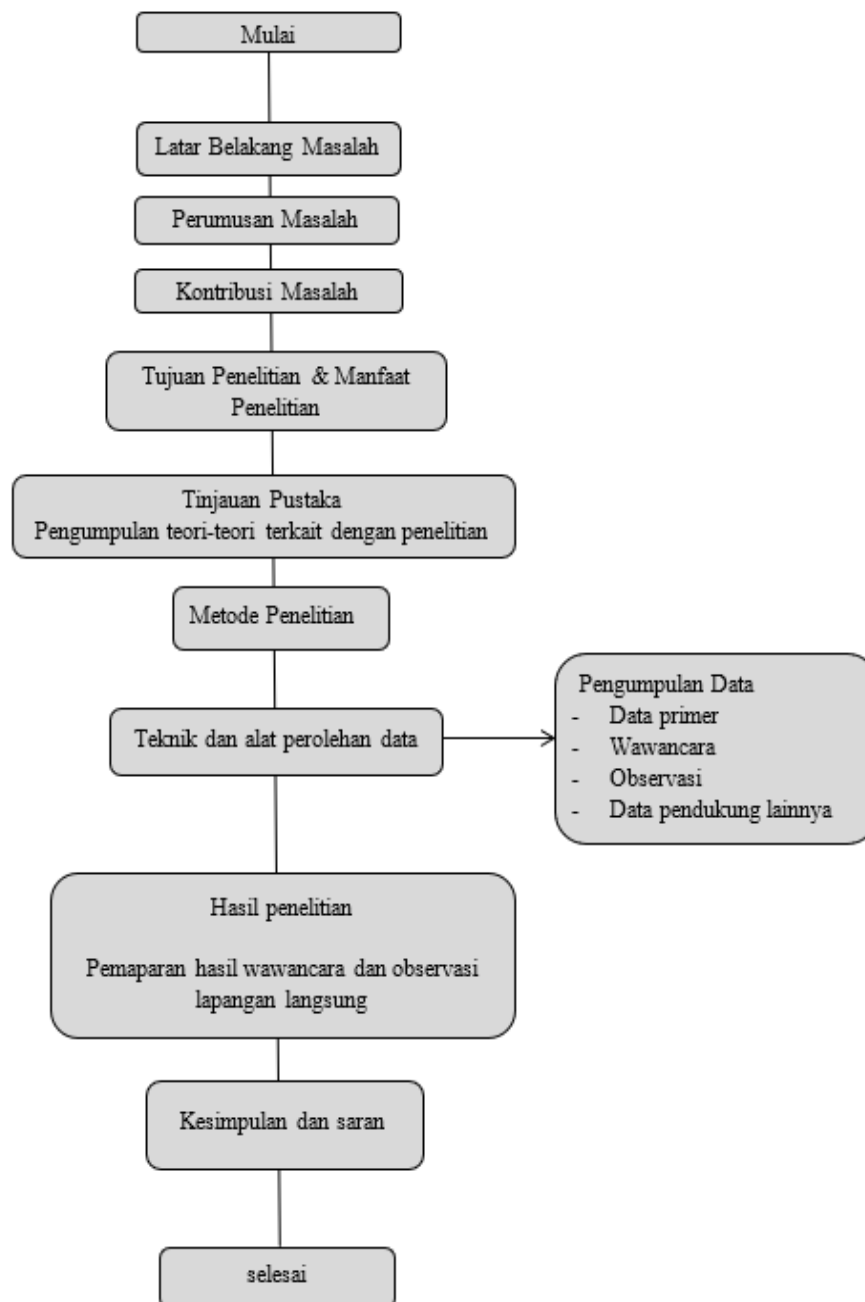
dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sebesar 47,1% dipengaruhi oleh variable lain.

Aprila dan Ikyarti (2019), dalam penelitiannya menguji Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten seluma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Penelitian ini respondennya yaitu bagian pengelola keuangan dari 26 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel independen, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan statistik analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Seluma.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian difokuskan terhadap Study Etnometodologi: Mengungkap Praktik Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan.

2.3.1 Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Alur kerangka pikir penelitian